

## PENGHAPUSAN KEBIJAKAN *TRANSMIGRATION & IMMIGRATION BAN* PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOE BIDEN

Zainul Fadhli Ramadhan<sup>1</sup>

### ABSTRACT

*The Transmigration & Immigration Ban policy was issued by President Trump to prevent the entry of terrorism from foreign countries, but the controversial policy was removed by President Biden, this article aims to explain the background of the abolition of the Transmigration & Immigration Ban policy by the United States Government under the leadership of President Biden against refugees from 7 Muslim-majority countries. This article uses an explanatory research type, uses secondary data with qualitative analysis techniques, and the theory used is the theory of decision making. The result of this study shows that the abolition of the policy by President Joe Biden was based on two factors, namely internal and external. For the first internal factor President Joe Biden abolishing this policy is contrary to democratic life in the US. the second is to protect US national security. third is President Biden's campaign promise and fourth is the negative impact of the policy on the US economy. Then for the first external factor, namely the negative view of foreign countries towards the US. the second is to secure US national interests in the Middle East region.*

**Keywords:** *Transmigration & Immigration Ban, The United States of America, Joe Biden, Donald Trump, Elimination, Decision Making.*

### Pendahuluan

Sejak peristiwa Penyerangan *World Trade Center* dan Pentagon pada 11 September 2001, serangkaian aksi terorisme yang diduga dilakukan oleh kelompok radikal terjadi di Amerika Serikat. Selain kedua peristiwa tersebut, beberapa tindak terorisme juga terjadi di Amerika Serikat, antara lain adalah penyerangan yang dilakukan oleh Reza Taheri Azar, seorang imigran dari Iran yang melakukan penabrakan massal di Universitas *North Carolina* pada 2006 (Hartsoe, 2006), dan percobaan pemboman pesawat *Northwest Airlines* dengan tujuan Amsterdam menuju Detroit oleh seorang pria berkebangsaan Nigeria bernama Omar Abdulmutallab pada tahun 2009 (O'Connor, 2009). Serangkaian peristiwa tersebut menyebabkan Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump mengusung ulang gagasan tentang Global War on Terrorism yang pertama kali dicetuskan pada masa Presiden George Bush Jr.

Dalam upayanya melaksanakan strategi memerangi terorisme global tersebut, Presiden Trump pada tanggal 27 Januari 2017 mengeluarkan Kebijakan *Transmigration and Immigration Ban* atau populer dikenal dengan istilah *Moslem Ban* (BBC, 2017). Kebijakan tersebut termuat dalam *Executive Order No.13769* Tahun 2017 tentang *Protecting The Nation from Foreign Terrorist Entry Into United States* (*National Archive and Record Administration*, 2017).

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : zainulfadhli03@gmail.com

Kebijakan tersebut bertujuan untuk melarang dan membatasi perjalanan orang-orang yang diberlakukan kepada 7 negara yang berada di kawasan Timur Tengah (Irak, Iran, Libya, Suriah, Sudan, Somalia, dan Yaman) untuk masuk ke Amerika Serikat.

Kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra baik dari dalam negeri dan luar negeri. Kelompok yang mendukung kebijakan tersebut seperti Klu Klux Klan dan kelompok Neo-Nazi menyetujui dan mendukung penuh dengan alasan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Trump memang dirasa perlu untuk memastikan Amerika Serikat aman dari bahaya tindakan terorisme dari negara luar (Akbar, 2015). Sebaliknya, kelompok yang menentang kebijakan tersebut antara lain dari *Immigrant Advocates and Rights Group* yang menganggap bahwa kebijakan tersebut sama saja seperti mendukung dan menyebarkan *Xenophobia* atau ketidaksukaan terhadap orang-orang dari ras, golongan, atau negara tertentu kepada masyarakat (Aljazeera, 2020).

Selain itu, beberapa negara juga menyatakan penolakannya dan mengecam kebijakan ini, diantaranya adalah dari Indonesia dibawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menyayangkan kebijakan Presiden Trump tersebut dan menyebut bahwa setiap manusia berhak atas kesetaraan dan keadilan tanpa melihat keyakinan yang ia anut apalagi mengaitkannya dengan isu-isu sensitif seperti terorisme. Jerman juga menjadi negara yang menolak kebijakan tersebut. Kanselir Jerman yang pada saat itu dijabat Angela Merkel mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan sebuah kesalahan besar dalam upaya memerangi terorisme (Reuters, 2017).

Sejalan dengan itu, kebijakan ini berdampak khususnya kepada mereka yang berasal dari ketujuh negara tersebut, diantaranya adalah yang dialami oleh Dr.Suha Abushamma, warga Amerika Serikat yang berasal dari Sudan yang merupakan seorang dokter yang telah bekerja lama pada sebuah klinik di kota Cleveland. Dr.Suha yang pada waktu itu baru kembali dari Sudan harus ditahan kepulangannya ke Cleveland karena otoritas bandara John F. Kennedy menahan dan melarangnya masuk ke Amerika Serikat (Al-Marashi, 2017).

Contoh lainnya adalah yang dialami oleh sebuah keluarga pengungsi Yazidi yang berasal dari Irak, mereka telah menunggu lama untuk mendapatkan visa dan sedang menunggu di gerbang keberangkatan bandara untuk bisa masuk ke Amerika Serikat, namun ditahan oleh otoritas keamanan dan pihak imigrasi karena mereka berasal dari Irak yang merupakan salah satu negara yang termuat didalam kebijakan Trump tersebut (Fulwood, 2017).

Kebijakan *Transmigration and Immigration Ban* akhirnya dihapuskan pada saat Joe Biden terpilih dan dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat pada tanggal 20 Januari 2021. Presiden Biden mengeluarkan *President Proclamation* nomor 10141 tentang *Ending Discrimination Bans on Entry to United States*. Kebijakan ini resmi mengakhiri *Executive Order* nomor 13769 tahun 2017 (*The White House*, 2021).

Langkah yang diambil oleh Presiden Biden sebenarnya mengabaikan pendapat sebagian masyarakat AS yang mendukung kebijakan tersebut. Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh Reuters kepada kurang lebih 1200 responden yang berasal dari kalangan orang dewasa pada 30-31 Januari 2017, hanya berselang 3 hari setelah ditetapkannya kebijakan *Transmigration and Immigration Ban*, hasil dari polling tersebut menyatakan bahwa 49% masyarakat Amerika Serikat setuju dengan kebijakan Presiden Trump tersebut dan menganggap bahwa mereka akan lebih aman jika kebijakan itu diberlakukan, kemudian 41% sisanya menyatakan bahwa mereka tidak

setuju terhadap kebijakan tersebut (Chris Kahn, 2017). Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang penghapusan kebijakan tersebut oleh Presiden Biden.

## Kerangka Teori

### Decision Making

Didalam kajian ilmu hubungan internasional, proses pengambilan sebuah keputusan adalah hal yang sangat penting dalam menjelaskan suatu kebijakan yang diambil oleh negara ataupun organisasi pada ranah politik internasional dan diperlukan 3 hal dalam mendukung proses pengambilan keputusan tersebut yaitu aksi, reaksi dan interaksi yang terjadi antar negara (Snyder, 2002). Aksi merupakan tindakan yang diperlukan guna memperoleh tujuan yang ingin dicapai sebuah negara.

Oleh karena itu, untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian Penghapusan Kebijakan *Transmigration & Immigration Ban* Pada Masa Pemerintahan Presiden Biden, penulis menggunakan konsep atau teori pengambilan keputusan atau Decision Making Theory oleh Richard C. Snyder. Menurut Snyder teori pengambilan keputusan diambil oleh aktor negara dipengaruhi oleh faktor internal dan juga eksternal didalam keputusannya untuk membuat dan menerapkan sebuah kebijakan luar negerinya (Snyder, Bruck, & Sapin, 2002). Perilaku serta struktur didalam kehidupan sosial juga menjadi faktor tambahan yang dapat memperkuat poin-poin teori pengambilan keputusan tersebut.

Faktor internal dalam pengambilan sebuah keputusan dipengaruhi oleh oleh kondisi maupun struktur dalam wilayah negara yang terdiri dari lingkungan non-manusia, lingkungan manusia, serta masyarakat. Lingkungan non-manusia mencakup posisi geografis dan juga sumber daya alam. Lalu lingkungan manusia adalah segala hal yang mencakup kebudayaan, kehidupan sosial, serta populasi manusia itu sendiri, dan komponen lingkungan masyarakat adalah berupa organisasi pemerintah dan non-pemerintah, media berita, opini dan pendapat publik, serta partai politik.

Lalu faktor eksternal dalam pengambilan keputusan dapat dipengaruhi oleh kondisi diluar batas-batas wilayah yang terdiri dari lingkungan non-manusia, budaya dari negara lain, masyarakat dari negara lain serta masyarakat yang terorganisir yang berfungsi sebagai negara. Faktor eksternal pertama yaitu lingkungan non-manusia terdiri dari kawasan geopolitik dan wilayah perbatasan negara, lalu yang kedua adalah budaya negara lain seperti halnya globalisasi, lalu yang ketiga adalah masyarakat negara lain yang mencakup organisasi internasional yang bersifat non-pemerintah, lalu yang keempat adalah masyarakat yang terorganisir yaitu negara-negara lain, organisasi internasional baik yang bersifat pemerintah maupun non-pemerintah. Berdasarkan pada kedua faktor utama tersebut maka *Decision Makers* atau aktor-aktor pembuat kebijakan berusaha menggabungkan faktor-faktor tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam membuat dan menetapkan kebijakan luar negerinya.

### Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatif. Data yang digunakan adalah menggunakan data sekunder. Serta metode untuk pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik telaah pustaka (*library research*). Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif yakni dengan mengumpulkan dan mengorganisir data-data yang diperoleh lalu dihubungkan dengan latar belakang penelitian yang kemudian

menghubungkan data tersebut dengan data-data yang lain untuk mendapatkan kesimpulan dan jawaban pada rumusan masalah penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Gambaran Umum Penelitian

*Transmigration & Immigration Ban* adalah kebijakan imigrasi yang dikeluarkan oleh Presiden Trump yang bertujuan membatasi dan melarang masuknya warga dari 7 negara mayoritas muslim untuk masuk ke AS dengan alasan menanggulangi masuknya teroris dari negara luar. Kebijakan ini menuai kontroversi didalam pelaksanaannya dan kemudian dihapus oleh Presiden Biden. Pada bagian ini akan menjelaskan kebijakan tersebut beserta pro dan kontra didalamnya, kemudian penghapusan kebijakan ini beserta alasan penghapusannya.

#### 1. Kebijakan *Transmigration & Immigration Ban*

Dalam upayanya melaksanakan strategi untuk memerangi terorisme, Presiden Trump mengeluarkan kebijakan ini pada tanggal 27 Januari 2017, kebijakan *Transmigration and Immigration Ban* tersebut dikeluarkan oleh Presiden Trump setelah ia menandatangani Perintah Eksekutif Nomor 13769 atau *Executive Order 13769* yang kemudian dirilis oleh *The White House*. Perintah Eksekutif Presiden Trump tersebut berisi tentang *Protecting The Nation from Foreign Terrorist Entry Into United States*.

Adapun tujuan utama Presiden Trump mengeluarkan kebijakan tersebut adalah untuk melakukan penghentian serta pelarangan perjalanan masuknya Imigran dari tujuh negara mayoritas muslim (Irak, Iran, Libya, Suriah, Sudan, Somalia, dan Yaman) untuk masuk ke Amerika Serikat.

Pemerintahan Presiden Trump mengidentifikasi dan melakukan investigasi dengan menyebutkan bahwa ketujuh negara yang tercantum didalam kebijakan tersebut sebagai negara yang didalamnya menjadi sarang dan tempat perlindungan bagi organisasi-organisasi teroris, baik yang berskala kecil hingga besar seperti kelompok Al-Qaeda dan *Islamic State of Iraq and Syria* atau ISIS, dan Presiden Trump juga menambahkan bahwa di negara tersebut juga banyak terdapat sub-organisasi teroris dan juga kelompok radikal yang terafiliasi ke dua organisasi teroris besar tersebut (Josh Gerstein, 2018).

#### 2. Pelaksanaan Kebijakan *Transmigration & Immigration Ban*

Kebijakan ini mengalami berbagai macam dinamika di dalam pelaksanaannya, mulai dari pertama kali ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2017 sampai penangguhan sementara atas pelaksanaan kebijakan tersebut oleh pengadilan federal di Massachusetts hingga keputusan Presiden Trump melakukan pembaruan aturan yakni dengan mengeluarkan *Executive Order 13780* yang dikenal dengan dengan istilah kebijakan *Moslem Ban 2.0* pada tanggal 6 Maret 2017 namun masih mendapatkan penangguhan hingga Mahkamah Agung kemudian memutuskan untuk mengizinkan penerapan kebijakan Presiden Trump tersebut secara bertahap pada tanggal 29 Juni 2017.

Pada tanggal 19 Juli 2017, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan perintah dan mereka memutuskan didalam penerapan kebijakan Presiden Trump bahwa orang-orang yang berasal dari negara-negara yang termuat didalam kebijakan *Moslem Ban 2.0* dan memiliki hubungan bonafide. Kemudian pada tanggal 24 September 2017 memperbarui kembali kebijakan yang ia buat

sebelumnya yang kemudian dikenal dengan istilah *Moslem Ban 3.0*. didalam pembaruan kebijakan ini Presiden Trump menambahkan beberapa negara lainnya kedalam daftar negara yang warganya dilarang untuk masuk ke Amerika Serikat yakni Mesir, Sudan Selatan, dan Chad, namun kembali mendapatkan penangguhan pelaksanaan oleh pengadilan negara bagian hawaii.

Kemudian, pada tanggal 17 Oktober 2017 Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemerintah AS dan pada tanggal 4 Desember 2017 kebijakan *Moslem Ban 3.0* diizinkan untuk diterapkan secara penuh.

Selama aturan tersebut diberlakukan, ada dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan kebijakan ini khususnya kepada orang-orang yang berasal dari negara-negara yang tercantum didalam daftar aturan larangan perjalanan tersebut. Beberapa dari mereka adalah warga yang hendak melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dan juga warga pendatang yang telah lama tinggal di AS. Seperti yang dialami oleh seorang imigran asal Iran bernama Samira Asghari.

Asghari yang pada saat itu hendak menuju Boston, Amerika Serikat dengan menggunakan pesawat yang berangkat dari kota Zurich, Swiss dilarang untuk melanjutkan perjalanannya meskipun ia memiliki visa pertukaran pelajar, otoritas keamanan AS menyampaikan bahwa Asghari tidak diperbolehkan masuk ke Amerika Serikat dikarenakan ia merupakan warga negara Iran yang dimana negara tersebut masuk didalam aturan larangan perjalanan yang baru saja diberlakukan Presiden Trump pada saat itu.

Kemudian yang menjadi korban dari kebijakan ini selanjutnya adalah Dr. Suha Abushamma, seorang dokter spesialis penyakit dalam yang bekerja pada *Cleveland Clinic Healthcare*, Cleveland. Dr. Abushamma sendiri adalah imigran yang berasal dari Sudan. Dr. Abushamma sendiri yang pada waktu itu sedang melakukan perjalanan kembali dari Sudan kemudian ke Arab Saudi lalu ke Amerika Serikat harus tertahan di bandara John F. Kennedy, New York. Meskipun ia memiliki visa kerja khusus, otoritas bandara tetap melarang Dr. Abushamma masuk karena visa yang ia gunakan berasal dari Sudan yang juga masuk kedalam daftar negara yang dilarang masuk ke Amerika Serikat (Orstein, 2017).

Lalu yang terakhir adalah dampak yang dialami oleh seorang pengungsi dari etnis Yazidi yang tidak ingin disebutkan namanya, dia menerangkan bahwa dia bersama anaknya sedang menunggu keberangkatan pesawat yang akan membawanya ke Amerika Serikat harus menghadapi kenyataan bahwa ia bersama anaknya dilarang masuk ke negara tersebut karena dia berasal dari Irak meskipun ia mengaku memiliki suami yang telah lama tinggal dan bekerja di AS.

### **3. Pro dan Kontra Pelaksanaan Kebijakan *Transmigration & Immigration Ban***

Kebijakan Presiden Trump tersebut menimbulkan pro dan juga kontra, ada pihak yang mendukung kebijakan tersebut dan sebaliknya juga ada yang menentang kebijakan itu sendiri, pro dan kontra bukan hanya datang dari dalam negeri saja. Berbagai respon yang diberikan terhadap kebijakan tersebut juga datang dari luar negeri.

Pertama, mereka yang mendukung kebijakan *Transmigration and Immigration Ban* adalah datang dari Andrew Anglin, seorang fanatik terhadap

supremasi kulit putih yang juga dikenal sebagai tokoh penting didalam organisasi Neo-Nazi di Amerika Serikat. Anglin dan kelompoknya mendukung penuh Trump dengan mengatakan gagasan "*Make America White Again*" adalah sebuah keharusan. Ia juga berpendapat tentang bahayanya potensi yang ditimbulkan bila warga muslim dari luar negeri terus menerus diperbolehkan masuk ke Amerika Serikat terutama masalah terkait terorisme (Alfred Ng, 2015).

Selanjutnya, dukungan terhadap Presiden Trump juga datang dari warga Amerika Serikat itu sendiri, berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh Politico pada Mei 2017 atau kurang lebih 4 bulan sejak kebijakan Trump ini pertama kali dikeluarkan, 6 dari 10 pemilih Donald Trump mendukung kebijakan larangan ini. Ketika ditanya lebih lanjut apakah mereka mendukung atau menentang kebijakan yang dimana pemohon visa dari 7 negara yang dilarang tersebut harus bisa membuktikan adanya hubungan keluarga dekat dengan seorang penduduk AS apabila ingin masuk kedalam negara itu, 60% responden mendukung pedoman ini, 28% menolak, dan 12% tidak memberikan jawaban (Politico, 2017).

Jajak pendapat lainnya juga dilakukan oleh *Grand Old Party* yang merupakan istilah lain dari partai Republik yang merupakan partai pengusung Presiden Trump. Hasil polling menunjukkan bahwa 84% responden pemilih partai Republik mendukung kebijakan larangan ini, kemudian 9% responden menentang, dan 7% responden tidak memberikan jawaban mereka (Politico, 2017).

Kemudian yang kedua adalah mereka yang kontra atau menentang kebijakan Presiden Trump yang dianggap kontroversial tersebut. Contohnya adalah demonstrasi penolakan kebijakan Presiden Trump yang diikuti oleh kurang lebih 2000 demonstran yang memenuhi gerbang kedatangan internasional bandara John F. Kennedy di kota New York pada tanggal 29 Januari 2017, lalu aksi serupa yang terjadi di bandara Metropolitan Detroit City, kota Detroit, di negara bagian Michigan pada tanggal 29 Januari 2017 yang diikuti kurang lebih 2500 massa yang terbagi kedalam beberapa bagian, sebagian besar diantara mereka berkumpul di gerbang kedatangan bandara, dan aksi unjuk rasa besar-besaran yang dilaksanakan di depan gedung Capitol Hill, Washington DC pada tanggal 26 Juni 2019 yang diinisiasi oleh berbagai lembaga serta organisasi masyarakat yang ada di AS seperti ACLU (*American Civil Liberties Union*), CAIR (*Council on American-Islamic Relations*), dan CWS (*Church World Service*). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk rasa kecewa mereka setelah Mahkamah Agung AS memutuskan untuk memperbolehkan kebijakan Moslem Ban untuk berlaku di AS dan menerima gugatan banding yang diajukan Presiden Trump (*TRT World*, 2019).

Selain penolakan yang datang dari dalam negeri, negara-negara luar juga menyampaikan penolakan dan menyayangkan terhadap kebijakan *Transmigration and Immigration Ban* yang dikeluarkan Presiden Donald Trump. Salah satunya adalah dari Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Pemerintah RI dibawah Presiden Joko Widodo menyampaikan penolakan serta menyayangkan opsi yang dipilih Presiden Trump tersebut, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa pentingnya

menjunjung nilai kesetaraan, mengutamakan keadilan, dan memperjuangkan nilai hak asasi manusia.

Banyaknya pro dan kontra yang ditimbulkan akibat dari dikeluarkannya kebijakan tersebut tidak serta merta membuat Presiden Donald Trump menyerah. Gugatan atas penolakan ke pengadilan yang terus disuarakan oleh mereka yang kontra dengan kebijakan tersebut kemudian dibalas oleh Presiden Trump dengan mengajukan banding serta gugatan agar kebijakan eksekutifnya tersebut dapat diberlakukan.

Menjelang pemilihan umum tahun 2020, Donald Trump yang kembali mencalonkan dirinya untuk maju sebagai calon Presiden dari partai Republik untuk periode kedua terindikasi akan terus melanjutkan kebijakan kontroversialnya ini.

#### **4. Dihapusnya Kebijakan *Transmigration & Immigration Ban***

Pemilihan umum tahun 2020 membawa Joe Biden naik ke kursi presiden. Selama kampanyenya, Biden menyampaikan kepada mereka yang menjadi korban dari kebijakan Presiden Trump bahwa ia akan segera menghapus kebijakan tersebut ketika ia terpilih sebagai presiden Amerika Serikat. Kemudian pada pelantikannya di gedung *Capitol Hill* tanggal 20 Januari 2021, Presiden Joe Biden langsung mengeluarkan kebijakan tentang penghapusan kebijakan *Transmigration and Immigration Ban* yang sebelumnya diberlakukan oleh Presiden Donald Trump.

Presiden Biden mengeluarkan perintah berupa *President Action/Proclamation* 10141 yang berisi tentang "*Ending Discriminatory Bans on Entry Into The United States*" pada 20 Januari 2021. Perintah tersebut dikeluarkan untuk menghentikan pemberlakuan atas *Executive Order* 13769 dan *Executive Order* 13780 yang dikeluarkan oleh Presiden Trump pada 27 Januari dan 6 Maret 2017. Kebijakan Presiden Trump ini resmi berakhir pemberlakuannya pada tanggal 21 Januari 2021.

Dihapusnya kebijakan tersebut mendapatkan reaksi positif dan disambut dengan sukacita oleh masyarakat AS yang menentang kebijakan ini sejak awal. Bahkan beberapa negara seperti Libya, Sudan, Iraq, dan Suriah mengapresiasi langkah yang diambil oleh Presiden Biden. Harapan dan semangat kembali tumbuh karena keinginan mereka untuk memulai kehidupan yang lebih baik di AS dapat terlaksana berkat bantuan yang diberikan oleh Presiden Biden (*The African News*, 2021).

#### **B. Alasan Penghapusan Kebijakan *Transmigration and Immigration Ban* Pada Masa Pemerintahan Joe Biden**

Dihapusnya kebijakan *Transmigration and Immigration Ban* oleh Presiden Joe Biden adalah berdasarkan pada *President Proclamation* yang ia keluarkan, Presiden Biden mengingatkan bahwa Amerika Serikat berdiri atas dasar rasa toleransi dan mengagungkan nilai-nilai kebebasan dalam beragama. alih-alih memperkuat pertahanan terhadap keamanan nasional, perintah eksekutif Donald Trump tersebut menurut Presiden Biden malah memperparah ancaman terhadap keamanan nasional.

Dalam menjelaskan secara lebih lanjut tentang alasan Presiden Joe Biden menghapus kebijakan tersebut, peneliti menggunakan Teori Pengambilan Keputusan atau *Decision Making Theory* oleh Richard Carlton Snyder. Sejalan dengan itu, alasan penghapusan kebijakan *Transmigration and Immigration Ban*

oleh Presiden Joe Biden secara tidak langsung dipengaruhi oleh faktor internal dan juga eksternal dalam proses perumusan hingga penetapan serta pemberlakuan kebijakan tersebut yang akan dijelaskan dibawah ini.

## 1. Faktor Internal

### A. Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Demokrasi di AS

Demokrasi di Amerika Serikat telah menjadi etos atau pandangan hidup di negara itu dan senantiasa menjadi penopang dalam mengangkat nilai-nilai kemanusiaan yang tentunya ada dan bergantung pada kehadiran setiap individu dalam membentuk norma-norma yang kemudian akan mengatur kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai demokrasi di Amerika Serikat mendapat ruang gerak yang sangat luas di dalam pelaksanaannya (Badu, 2015).

Meskipun dikenal sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, demokrasi di negara tersebut pernah mengalami “kecacatan”. Salah satu yang menyebabkannya adalah diterapkannya kebijakan *Transmigration and Immigration Ban* oleh Presiden Donald Trump. Kebijakan yang dikeluarkan Presiden Trump yang bertujuan untuk membatasi dan melarang masuknya warga dari negara-negara mayoritas muslim ke Amerika Serikat yang tentu sangat berbanding terbalik dengan semangat berdemokrasi yang digaungkan oleh bangsa Amerika itu sendiri.

Atas dasar itulah mengapa Presiden Joe Biden kemudian memutuskan untuk menghapus kebijakan Trump tersebut dengan tujuan agar tidak ada lagi ketimpangan dan kesenjangan kehidupan berdemokrasi yang telah lama menjadi bagian dan jati diri bangsa Amerika.

### B. Melindungi Keamanan Nasional AS

Menghapus kebijakan *Transmigration and Immigration Ban* tersebut adalah sebagai bentuk upaya Presiden Biden untuk menghentikan serta mencegah terancamnya keamanan nasional di Amerika Serikat. Langkah pengamanan yang diambil oleh Presiden Biden memang sangat penting untuk dilakukan karena bagaimanapun setiap pemimpin negara berkewajiban untuk mengutamakan kepentingan negaranya terlebih dahulu sebelum melakukan kebijakan-kebijakan lain, salah satu contohnya adalah kebijakan untuk memastikan keamanan nasional tetap terjaga.

Masalah keamanan nasional yang ingin diselesaikan oleh Presiden Joe Biden adalah terkait dengan banyaknya demonstrasi serta reaksi penolakan keras yang dilakukan oleh warga Amerika Serikat terhadap pemberlakuan kebijakan *Moslem Ban*. Penolakan keras serta pengecaman diekspresikan oleh warga AS dengan melakukan unjuk rasa serta aksi demonstrasi mulai yang berskala kecil hingga besar. Walaupun demonstrasi atau aksi unjuk rasa tidak sepenuhnya menjadi faktor terancamnya keamanan nasional dan undang-undang telah menjamin kebebasan dalam menyuarakan pendapat, tetapi jika aksi-aksi ini terjadi secara terus menerus dikhawatirkan akan menyebabkan kekacauan sosial atau *Social Chaos*.

Hal tersebut yang kemudian membuat Presiden Biden memutuskan menghapus kebijakan *Moslem Ban* yang sebelumnya diberlakukan pada masa Presiden Donald Trump. Lebih dalam lagi, Presiden Biden tidak ingin aksi-aksi penolakan serupa yang pernah terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya kembali muncul dikemudian hari jika kebijakan tersebut tidak ia hapuskan (*The Washington Post*, 2020).



### C. Janji Kampanye Presiden Joe Biden

Pada pemilihan umum 2020, Joe Biden dan Donald Trump masing-masing melakukan kampanye untuk mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya agar dapat memenangkan kontestasi pemilihan Presiden AS. Utamanya dalam isu terorisme, kedua calon Presiden memiliki tujuan berbeda yang ingin dilaksanakan apabila terpilih sebagai Presiden AS khususnya Joe Biden.

Dalam kampanye yang Biden sampaikan apabila terpilih sebagai Presiden AS ia memiliki 5 prioritas utama yang ingin ia laksanakan pada kepemimpinannya nanti yakni memerangi wabah COVID-19, meningkatkan serta memajukan perekonomian AS, memerangi diskriminasi pada isu-isu sosial seperti agama dan ras, serta melawan perubahan iklim. Pada poin memerangi diskriminasi isu-isu sosial Biden mengatakan bahwa salah satu janji utamanya adalah menghapus kebijakan *Transmigration and Immigration Ban*. Biden berpendapat bahwa rasisme dan diskriminasi terhadap minoritas menjadi masalah yang menyebabkan terganggunya kehidupan sosial budaya dan masyarakat di AS selama kepemimpinan Presiden Trump sejak 2017 yang lalu.

Janji kampanye yang telah disampaikan oleh Joe Biden sebelumnya akhirnya akan dilaksanakan oleh Joe Biden setelah ia berhasil dinyatakan sebagai pemenang pada pemilihan umum pada tanggal 3 November 2020, pada pernyataannya, Presiden terpilih Joe Biden memastikan bahwa ia akan melaksanakan janji untuk menghapus kebijakan Presiden Trump setelah pelantikannya nanti, dan pada tanggal 20 Januari 2021, atau tepat setelah pelantikannya sebagai Presiden AS di *Capitol Hill*, Presiden Joe Biden secara resmi mengeluarkan *President Proclamation 10141* tentang penghapusan kebijakan *Transmigration and Immigration Ban*.

### D. Dampak Negatif Terhadap Ekonomi AS

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *NAE Research Fund (New American Economy)*, sebuah lembaga penelitian serta organisasi advokasi yang memperjuangkan terciptanya kebijakan imigrasi federal, negara bagian, serta masyarakat lokal yang cerdas yang bertujuan membantu menumbuhkan ekonomi serta terciptanya lapangan pekerjaan bagi semua orang Amerika, pada penelitian tersebut mereka mengatakan bahwa kebijakan Presiden Trump ini memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Amerika Serikat yang dimana pemberlakuan kebijakan larangan perjalanan secara tidak langsung akan meningkatkan biaya ekonomi yang naik signifikan. Melarang imigran datang juga membuat ekonomi Amerika Serikat berada didalam ancaman serius, permasalahan ekonomi juga tentu akan mengakibatkan timbulnya permasalahan yang lain. Perlu diketahui juga bahwa kontribusi ekonomi yang diberikan oleh imigran dari negara yang terkena aturan larangan perjalanan kepada pemasukan anggaran belanja nasional Amerika Serikat menjadi salah satu yang paling signifikan meskipun jumlah mereka hanya sebagian kecil dari total populasi (*New American Economy*, 2020). Kontribusi pemasukan negara yang diberikan oleh imigran akan dijelaskan menggunakan tabel dibawah ini:

**Tabel Kontribusi Imigran yang Terkenal Travel Ban, 2018**

	<b>Naturalized Citizens</b>	<b>Non-Citizens</b>	<b>Total</b>
Household Income	\$16.3 Billion	\$5.7 Billion	<b>\$22 Billion</b>
Total Taxes Paid	\$4.7 Billion	\$1.4 Billion	<b>\$6.1 Billion</b>
--Federal Income Taxes Paid	\$3.2 Billion	\$847.4 Million	<b>\$4.0 Billion</b>
--State and Local Taxes Paid	\$1.6 Billion	\$552.4 Million	<b>\$2.1 Billion</b>
Spending Power	\$11.6 Billion	\$4.3 Billion	<b>\$15.9 Billion</b>

Sumber: Analisis NAE data survei ACS 1 tahun 2018 diunduh dari IPUMS-USA ([www.ipums.org](http://www.ipums.org))

Pada penjelasan tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kontribusi yang diberikan oleh imigran terhadap pertumbuhan ekonomi di AS terbilang besar dan apabila kebijakan Presiden Trump tersebut terus diberlakukan, untuk kedepannya dikhawatirkan perekonomian AS akan semakin terpuruk (*New American Economy*, 2020). Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Presiden Biden yang memutuskan untuk menghapus kebijakan Trump tersebut. Bagaimanapun, sektor ekonomi adalah fokus penting untuk dipertimbangkan dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara dan Presiden Biden menyatakan bahwa pemerintahannya akan memperbaiki sistem imigrasi yang legal sehingga memudahkan imigran dan pengungsi dari luar negeri dapat masuk dan bekerja di AS (Vox, 2021).

## **2. Faktor Eksternal**

### **A. Pandangan Negatif dari Negara Luar**

Pandangan negatif serta kecaman diberikan oleh negara lain dan juga organisasi internasional kepada Amerika Serikat. alasan yang membuat negara-negara beserta organisasi internasional melakukan hal tersebut adalah sebagai bentuk protes mereka kepada Amerika Serikat karena kebijakan Presiden Trump ini dianggap sangat diskriminatif. Pada artikel ini menjelaskan beberapa negara yang mengancam kebijakan Trump tersebut yakni Kanada, Prancis, dan Italia yang ketiganya merupakan negara yang juga menerima pengungsi dan imigran dari negara yang terdapat didalam kebijakan Trump ini.

Pertama, kecaman terhadap kebijakan Presiden Trump disampaikan oleh negara yang bertetangga langsung dengan Amerika Serikat yakni Kanada. Pemerintah Kanada yang dipimpin oleh Perdana Menteri Justin Trudeau menyampaikan keprihatinan dan juga kecaman terhadap Presiden Trump atas kebijakan yang PM Trudeau anggap sebagai langkah yang menyakiti orang-orang yang tidak bersalah. PM Trudeau juga memberikan pernyataannya tentang kesediaan Kanada untuk membantu mereka yang melarikan diri dari ancaman persekusi, teror, dan perang yang terjadi di negara-negara asal mereka, pada bagian akhir pernyataannya PM Trudeau mengatakan “Perbedaan adalah

Kekuatan Negara Kita”, hal itu merujuk pada prinsip Kanada yang menganggap perbedaan bukanlah hal yang berbahaya dan justru dapat menjadi kekuatan bangsa (Kershaw, 2017).

Kedua, penolakan datang dari Prancis. Francois Hollande yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden Prancis langsung bereaksi memberika tanggapan penolakannya terhadap Presiden Trump dan mengatakan bahwa Prancis mengecam tindakan Presiden Trump tersebut yang dianggap terlalu overprotektif. Presiden Hollande meminta agar Presiden Trump harus memiliki sikap rendah hati dengan menghormati pengungsi serta orang-orang yang menjadi korban kekerasan di negara asal mereka, Presiden Hollande juga mengingatkan kepada Presiden Trump bahwa dampak dari kebijakan overprotektif ini ditakutkan akan memberikan konsekuensi yang justru merugikan Amerika Serikat itu sendiri. Kecaman dari Presiden Hollande tersebut juga didukung oleh Menteri Luar Negeri Prancis Jean Marc-Ayrault yang mengatakan alasan-alasan yang dibuat oleh Presiden Trump dalam mengeluarkan kebijakan tersebut tidak bisa dibenarkan sama sekali, permasalahan terorisme adalah permasalahan yang sama sekali tidak memiliki korelasi dengan agama dan kebangsaan. Menlu Jean juga menambahkan tentang pentingnya untuk bersikap terbuka kepada mereka yang menjadi imigran dan pengungsi karena hal itu merupakan tugas bersama sebagai wujud menghormati nilai-nilai HAM.

Ketiga, penolakan selanjutnya datang dari Italia yang merupakan salah satu negara yang juga memiliki permasalahan yang berhubungan dengan pengungsi dan juga imigran dari negara lain. Italia merupakan salah satu negara tujuan utama bagi para pengungsi tersebut. Pemerintah Italia menyikapi kebijakan larangan perjalanan yang dikeluarkan Presiden Trump dengan mengatakan bahwa Italia menolak dan mengecam langkah tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Perdana Menteri Italia Paolo Gentiloni yang juga menambahkan bahwa Italia akan senantiasa menjadi negara yang terbuka, terbuka bagi siapa saja, mengutamakan sikap anti diskriminasi serta selalu dekat dengan komunitas muslim dan juga pengungsi dari negara lain serta menolak dengan tegas mengaitkan isu terorisme dengan agama atau ras tertentu. Reaksi tidak hanya diberikan oleh lembaga eksekutif saja, legislatif di negara tersebut yang diwakili Ketua DPR Italia Laura Boldrini bahkan menyerukan kepada pemerintah Italia dan juga anggota kongres untuk memberikan kecaman yang lebih keras kepada Presiden Trump, Boldrini menuduh Presiden Trump sudah sangat jelas menargetkan kelompok-kelompok tertentu dalam mengeluarkan kebijakan larangan perjalanan yang ia keluarkan (*The Local Italy*, 2017).

### **B. Mengamankan Kepentingan Nasional AS di Timur Tengah**

Negara-negara di kawasan Timur Tengah sendiri memberikan reaksi penolakan dan kecaman yang keras kepada Presiden Trump. Penghapusan kebijakan tersebut dilakukan Presiden Biden selain dalam rangka untuk memulihkan hubungan dengan negara di Timur Tengah, Presiden Biden juga ingin mengamankan berbagai kepentingan nasional AS di kawasan tersebut yang pada masa Presiden Trump sempat berada dibawah ancaman. Pada bagian ini akan dijelaskan reaksi penolakan dari 2 negara di kawasan Timur Tengah yakni Iran dan Irak, kemudian akan dijelaskan apa kepentingan AS yang ingin diamankan Presiden Biden di kedua negara tersebut.

Pertama, Iran menjadi salah satu negara yang dimasukkan oleh Presiden Trump kedalam daftar negara yang warganya ia larang masuk ke AS, Presiden Trump menganggap bahwa Iran menjadi negara yang sangat berbahaya bagi keamanan nasional AS karena kekhawatiran Presiden Trump terhadap program pengayaan nuklir Iran yang kian hari menunjukkan perkembangan yang semakin pesat dan AS menduga Iran telah membuat senjata biologis. Iran menjadi salah satu negara yang menentang keras kebijakan Trump ini yang disampaikan oleh Presiden Hassan Rouhani yang memberikan pernyataannya bahwa pembatasan terhadap orang-orang muslim yang hendak masuk ke AS dengan alasan mencegah teroris adalah bentuk penghinaan besar terhadap dunia muslim khususnya masyarakat Iran. Presiden Rouhani juga akan melakukan tindakan balasan terhadap apa yang telah Presiden Trump lakukan kepada negaranya, Presiden Rouhani mengancam akan segera membuat kebijakan pelarangan masuknya warga AS ke Iran, apabila dilanggar, Pemerintah Iran tidak segan memberikan sanksi kepada warga AS yang mencoba masuk ke negara tersebut (Reuters, 2017).

Sejak peristiwa Revolusi Islam di Iran pada tahun 1979, hubungan AS dan Iran mengalami pasang surut, ditambah dengan keputusan Trump mengeluarkan AS dari kesepakatan nuklir JCPOA (*Joint Comprehensive Plan of Action*) semakin memperburuk hubungan antara kedua negara tersebut. Oleh karena itu, sebagai langkah awal dalam memperbaiki hubungan AS dengan Iran, Presiden Biden kemudian menghapus kebijakan *Moslem Ban* tepat pada hari pertama kepresidenannya, keputusan Presiden Biden yang ingin memperbaiki hubungan negaranya dengan Iran memiliki alasan khusus tersendiri yakni adanya kepentingan nasional AS di negara tersebut yang ingin diamankan yakni pada sektor keamanan negara sekutu AS di Timur Tengah yakni Saudi Arabia dan Israel yang sewaktu-waktu dapat terancam oleh program nuklir Iran.

Selanjutnya, Irak menjadi negara Timur Tengah lainnya yang dimasukkan Presiden Trump kedalam kebijakan larangan perjalanan yang ia buat. Presiden Trump beralasan bahwa Irak merupakan ancaman nyata terhadap keamanan nasional AS karena negara ini menjadi salah satu tempat berdirinya organisasi teroris ISIS yang akhir-akhir ini banyak melakukan aksi teror baik di kawasan Timur Tengah maupun di negara-negara lainnya termasuk AS (*The Wilson Center*, 2019). Pemerintah Irak yang diwakili oleh Perdana Menteri Haidar Al-Abadee menyampaikan sikap tegas Irak menentang kebijakan Presiden Trump ini yang dan mendesak kepada Presiden Trump untuk meninjau ulang kebijakan yang ia keluarkan tersebut. Warga Irak juga mengutarakan kemarahan dan kebencian mereka terhadap AS karena dianggap berkhianat kepada mereka, AS sendiri sebelumnya memiliki kesepakatan dengan pemerintah Irak untuk membantu mereka melawan organisasi ISIS, namun Presiden Trump justru menganggap Irak sebagai biang munculnya organisasi tersebut.

Menyikapi hal ini, Presiden Biden memutuskan untuk menghapus kebijakan larangan perjalanan di masa Presiden Trump. Langkah ini perlu diambil selain untuk memperbaiki hubungan diplomatik, Presiden Biden juga ingin mengamankan sektor minyak Irak yang menjadi kepentingan nasional utama bagi AS. Melimpahnya cadangan minyak di Irak tentunya menjadi perhatian

khusus bagi AS karena sektor perminyakan menjadi salah satu roda penggerak perekonomian di negeri paman Sam tersebut. Berdasarkan data yang diberikan oleh *Organization of The Petroleum Exporting Countries* atau OPEC pada tahun 2018, Irak memiliki cadangan minyak berjumlah 145 miliar barrel, menjadikan negara ini berada pada posisi keempat sebagai negara yang menyimpan cadangan minyak terbanyak setelah Arab Saudi (267 miliar barrel) yang juga diketahui merupakan salah satu negara sekutu AS di kawasan Timur Tengah (OPEC, 2019).

### Kesimpulan

Dihapusnya kebijakan *Transmigration & Immigration Ban* oleh Presiden Biden didasari oleh 2 faktor yakni internal & eksternal yang mendorong Presiden Biden untuk menghapus kebijakan ini. Pertama adalah kebijakan tersebut berlawanan dengan nilai kehidupan berdemokrasi di AS. Alasan kedua adalah agar kondisi keamanan dalam negeri tidak berada didalam ancaman karena banyaknya aksi demonstrasi dan penolakan yang muncul pada saat kebijakan Trump ini berlaku. Ketiga adalah janji kampanye Joe Biden ketika mencalonkan diri sebagai Calon Presiden AS pada pemilu 2020. Keempat adalah dampak buruk bagi ekonomi AS yang disebabkan oleh adanya kebijakan Presiden Trump ini mengingat kontribusi yang diberikan imigran terhadap perekonomian AS cukup besar.

Kemudian, faktor eksternal penghapusan kebijakan tersebut didasari oleh 2 alasan, pertama adalah sebagai langkah yang diambil oleh Presiden Biden untuk memperbaiki citra buruk AS karena pandangan negatif serta kecaman keras serta penolakan terhadap kebijakan Presiden Trump yang ditujukan oleh negara-negara lain kepada AS. Alasan kedua adalah Presiden Biden ingin memastikan segala kepentingan nasional AS di Timur Tengah dapat berjalan dengan baik dan dapat mengamatkannya. Berlakunya kebijakan tersebut di masa Presiden Trump mengakibatkan rusaknya hubungan dan kepercayaan negara-negara pada kawasan ini. Oleh karena itu, memperbaiki hubungan dengan Negara-negara pada kawasan tersebut menjadi agenda penting Presiden Biden didasarkan pada pentingnya menjaga hubungan baik dengan negara lain serta menghindari terganggunya pemerintah AS dalam menjalankan dan mengamankan kepentingan nasional mereka di kawasan ini.

### Daftar Pustaka

- ADL.org, Andrew Anglin: Five Things to Know. Anti-Defamation League (ADL): Extremism, Terrorism & Bigotry. <https://www.adl.org/resources/news/andrew-anglin-five-things-know> diakses pada 13 Agustus 2022.
- Akbar Jay, *Donald Trump's call to ban Muslims from entering US is praised by Neo-nazis and Ku Klux Klan supporters demanding, 'Make America white again'*. Available at <https://www.dailymail.co.uk/news/article-3352306/Donald-Trump-s-call-ban-Muslims-entering-PRAISED-Neo-nazis-Ku-Klux-Klan-supporters-demanding-Make-America-white-again.html> diakses pada 19 Februari 2022.
- Al-Jazeera. *US Muslim Ban Set to End on Day One of Joe Biden's Presidency*. Al-Jazeera News. <https://www.aljazeera.com/news/2020/11/8/us-muslim-ban-set-to-end-on-day-one-of-biden-presidency> diakses pada 12 Juni 2022.

- Aljazeera.com, 'Muslim ban should end, not expand': Groups slam Trump travel ban'. Available at <https://www.aljazeera.com/news/2020/2/1/muslim-ban-should-end-not-expand-groups-slam-trump-travel-ban> diakses pada 19 Februari 2022.
- Al-Marashi, Huda, "The US Muslim ban and the story of my Iraqi father" Available at <https://www.aljazeera.com/opinions/2017/2/4/the-us-muslim-ban-and-the-story-of-my-iraqi-father> diakses pada 24 Maret 2022.
- American Civil Liberties Union. Muslim Ban Policy Timeline. ACLU NorCal <https://www.aclunc.org/sites/muslim-ban/> diakses pada 11 Juni 2022.
- Azmi, Naufal Afif, 2019. "Analisis Kebijakan *Global War on Terror* di Era Donald Trump". Jurnal SENASPOLHI Universitas Wahid Hasyim. Halaman 286-291.
- BBC Indonesia. Indonesia Sayangkan Kebijakan Imigrasi Presiden AS Donald Trump, Malaysia 'diam'. CNN News Indonesia <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38795217> diakses pada 12 Juni 2022.
- Fulwood, Sam, "The Real Effect of Trump's Muslim Ban". Available at <https://www.americanprogress.org/article/the-real-effect-of-trumps-muslim-ban/> diakses pada 24 Maret 2022.
- Gerstein Josh, Lin F. Jeremy, Politico. Why These 7 Countries Are Listed on Donald Trump's Travel Ban Policy <https://www.politico.com/interactives/2018/trump-travel-ban-supreme-court-decision-countries-map/> diakses pada 11 Juni 2022.
- Hartsoe Steve, UNC Grad in Court on Alleged Hit and Run, available at <https://apnews.com/article/29c13b60ccfad04c53f841326addc9ff> diakses pada 19 Maret 2022.
- Hawkins Andrew, The Verge. JFK Airport Roiled By Protests Against Donald Trump's Immigration Ban. The Verge: US and World <https://www.theverge.com/2017/1/28/14426962/nyc-tax-ban-jfk-airport-trump-muslim-ban-uber> diakses pada 20 Juni 2022.
- Kahn Chris, Reuters, Exclusive: A Third of Americans Think Donald Trump's Travel Ban Will Make Them Safer. Reuters Politics <https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-immigration-poll-exclusive-idUSKBN15F2MG> diakses pada 11 Juni 2022.
- Lewin Lyric, CNN. In Support of a Travel Ban. CNN Politics <https://edition.cnn.com/interactive/2017/03/politics/travel-ban-supporters-cnnphotos/> diakses pada 10 Juni 2022.
- National Archive and Record Administration, Executive Order 13769-Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States. Available at <https://www.govinfo.gov/app/details/DCPD-201700076> diakses pada 18 Maret 2022.
- Ng Alfred, New York Daily News and Politics. "Heil Donald Trump: Neo Nazi's, White Supremacists Show Support for Billionaire's Policy to Ban All Muslim from

- US". *New York Daily*. <https://www.nydailynews.com/news/politics/heil-donald-trump-racists-support-donald-trump-policy-article-1.2459327> diakses pada 11 Juni 2022.
- O'Connor, Schmitt, *Terror Attempt Seen as Man Tries to Ignite Device on Jet*. Available at <https://www.nytimes.com/2009/12/26/us/26plane.html> diakses pada 19 Maret 2022.
- Politico.com, Poll: Majority of voters back Trump travel ban. <https://www.politico.com/story/2017/07/05/trump-travel-ban-poll-voters-240215> diakses pada 13 Agustus 2022.
- Rahal Sarah, *The Detroit News*. *Protesters Rally Against Donald Trump's Travel Ban in Detroit*. <https://www.detroitnews.com/story/news/local/detroit-city/2018/06/26/protesters-rally-against-trump-travel-ban-detroit/735334002/> diakses pada 20 Juni 2022.
- Reuters.com, *Merkel says U.S. travel ban not justified by terror fight.*, Available at <https://www.reuters.com/article/uk-usa-trump-immigration-germany-idUKKBN15E1J4> diakses pada 7 Februari 2022.
- Snyder Richard, Bruck H.W, Sapin Burton. 1969. *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*. New York: The Free Press
- The African News*. *Hope and Joy as President Joe Biden Revokes Trump's Muslim Travel Ban Policy*. *The African News: World: Muslim Ban*. <https://www.africanews.com/2021/01/21/hope-joy-as-president-biden-revokes-muslim-travel-ban/> diakses pada 5 Juli 2022.
- The White House*, "Proclamation on Ending Discriminatory Bans on Entry to The United States" Available at <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/20/proclamation-ending-discriminatory-bans-on-entry-to-the-united-states/> diakses pada 7 Februari 2022.
- TRT World, *US Rights Groups Protest Donald Trump's Travel Ban*. *TRT World: Americas*. <https://www.trtworld.com/americas/us-rights-groups-protest-trump-s-travel-ban-27825> diakses pada 20 Juni 2022.
- Vox.com, *Biden's plan to increase legal immigration could aid the pandemic economy recovery*. <https://www.vox.com/policy-and-politics/22528094/biden-legal-immigration-pandemic-economy-recovery> diakses pada 13 Agustus 2022.